



Analisis Penerapan *Petty Policy* oleh Amerika Serikat Melalui African Growth Opportunity Act dalam Kerja Sama Perdagangan Pakaian Bekas dengan East African Community

Annisa

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisipundip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

In 2015, countries united under organization named East African Community (EAC), declared will ban importation on second-hand clothes started in 2019. During EAC Summit which held on February 22nd, 2018, the leaders agreed to relocate their investment to local industries, and implementation of tariffs on second-hand clothes. Unfortunately, President Donald Trump threatened will remove aids given to the countries through African Growth Opportunity Act (AGOA), a regulation which eliminate trade tariffs. He also threatened Rwanda, as one of the ban initiator, by removing its membership from AGOA. However, from profit calculations, second-hand trade have little impacts for United States economy. This research will use decision making theory to explain the motives of US 'threatening' action to East African Community. This research use one of its concept, Rational Actor Model (RAM) to analyze further the reasons behind US petty action through the AGOA's platform. The main argument of this reserach is US desicion is rational, motivated by two factors: to solve environmental problem caused by secondhand clothes and regaining political influence within East African region by securing the secondhand clothing trade with EAC.

Keyword: *second-hand clothes, East Africa, decision making theory, trade cooperation, petty policy.*

PENDAHULUAN

African Growth Opportunity Act (AGOA) merupakan perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada 18 Mei 2000 telah diperpanjang tahun 2015 lalu. Ketika Presiden Barack Obama memimpin, diperpanjang masa berlakunya perjanjian ini hingga tahun 2025 (*African Growth and Opportunity Act, 2015*). AGOA berisi seperangkat aturan mengenai kerja sama perdagangan antara Amerika Serikat dengan negara-negara benua Afrika. Tujuan diciptakannya perjanjian kerja sama antara Amerika Serikat (AS) dan negara Sub-Sahara Afrika (SSA) adalah untuk mencapai diversifikasi ekonomi, kapitalisasi, menciptakan iklim pasar yang kompetitif serta pertukaran tenaga kerja lintas negara (Yiannoutsos, 2017). Selain itu, negara-negara yang berpartisipasi harus meningkatkan penegakan hukum, hak asasi manusia (HAM), dan memenuhi standar utama ketenagakerjaan layaknya AS (*African Growth and Opportunity Act, 2013*).

Setelah berjalan selama tiga tahun, AGOA telah memberikan banyak manfaat bagi negara-negara SSA, khususnya Afrika Timur, terutama dalam peningkatan ekspor produk

lokal. Namun, kerja sama ini dinilai gagal dalam meningkatkan independensi serta pembangunan ekonomi berkelanjutan. Salah satu aspek permasalahannya yaitu mengenai impor pakaian bekas. Pakaian bekas merupakan salah satu kategori *clothing waste*, bersamaan dengan sampah makanan atau sampah-sampah lainnya (Brooks, 2015). Konsumsi masyarakat akan sandang yang tinggi memunculkan industri baru yang disebut *fast-fashion industry*. Industri ini ‘berkontribusi besar’ dalam menciptakan sampah garmen karena produksinya yang masif ditambah peminatnya yang tinggi; serta dijual dengan murah. AS menduduki peringkat pertama sebagai eksportir pakaian bekas. Ekspor pakaian bekas AS di tahun 2016 mencapai \$648 juta atau sekitar 18 persen (The Observatory of Economic Complexity, 2016). Di tahun yang sama, impor pakaian bekas oleh negara-negara yang tergabung di dalam East African Community (EAC) menembus angka \$151 juta (The Guardian, 2017).

Ketergantungan ini mengakibatkan industri garmen dan tekstil lokal sulit untuk bersaing. Pasaunya, harga pakaian-pakaian bekas ini tergolong sangat murah. Contoh, satu pasang celana harganya hanya \$2 saja atau seharga €1,5 (The Guardian, 2017). Padahal, negara-negara EAC memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan industri tekstil lokal. Hampir semua negara-negara EAC, kecuali Rwanda, melakukan ekspor kapas secara masif dan mencapai angka 70 hingga 85 persen pertahunnya. EAC juga mengekspor bahan-bahan kulit mentah dari binatang ternak sebesar 80-90 persen, dan 10 persennya diproses menjadi bahan kulit (Katende-Magezi, 2017). Menyikapi permasalahan tersebut, beberapa negara EAC berusaha untuk menghentikan atau meminimalisir ketergantungan terhadap impor pakaian bekas dari AS. Dalam forum *joint statement*, negara-negara yang tergabung dalam EAC sepakat untuk memprioritaskan pengembangan industri tekstil dan kulit yang kompetitif, sehingga mampu mencukupi kebutuhan masyarakatnya sendiri (The East African, 2018). Rwanda, telah bersikap cukup keras dalam melarang impor pakaian bekas dengan menaikkan tarif impor 20 kali lipat lebih tinggi. Di Uganda, impor pakaian bekas tidak akan dihentikan, namun tarif impor tetap harus dibayar. (Mumbere, 2018). Merespons aksi dari negara-negara EAC, AS mengancam akan menunda akses bebas pajak ekspor bagi Rwanda, Tanzania serta Uganda hingga ketiga negara tersebut mengangkat larangannya (African Growth and Opportunity Act, 2018). Takut akan ancaman tersebut, Kenya, yang semula mendukung larangan impor ini, tiba-tiba membatalkannya (Quartz Africa, 2018). Dari segi pendapatan negara, AS mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit dari ekspor pakaian bekas. Sejak tahun 2012, ekspor pakaian bekas AS ke semua negara EAC mendapatkan keuntungan sebesar \$43 juta, menyumbang devisa negara hanya 0,03 persen pertahunnya. Ditambah lagi, tidak adanya pemasukan akibat penerapan *non-tariff* pada produk *apparel* (The Conversation, 2018).

Sejauh ini, belum ada penelitian mengenai penjelasan atas motif AS terhadap perdagangan pakaian bekas dengan EAC. Hanya ada artikel dari Frazer (2017), yang menjelaskan mengenai sejarah perdagangan pakaian bekas antara AS dengan negara-negara anggota AGOA. Frazer menjelaskan bahwa AS mengalami kepentingan luar negeri di AS tidak lagi berpusat pada HAM dan kebebasan demokrasi, namun kepentingannya untuk bisa ‘membuang’ pakaian bekas ke negara-negara Afrika melalui jalur perdagangan (The Conversation, 2018).

PEMBAHASAN

Pakaian bekas asal AS pada mulanya dikumpulkan oleh organisasi sukarela atau perusahaan-perusahaan *fast-fashion* itu sendiri, mulai dari tempat pembuangan limbah rumah tangga, tumpukan sampah tekstil, pusat perbelanjaan, sekolah, komunitas atau organisasi sosial, dan lain-lain (Norris, 2012). Pakaian-pakaian tersebut dipilih yang masih layak untuk dikenakan lalu didistribusikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Beberapa jenis pakaian

akan dijual di negara itu sendiri sebagai *consignment*¹ (Norris, 2012). Sisanya, akan dimasukkan ke dalam suatu wadah yang dapat menampung pakaian hingga 55 kilo per bal dan dipisahkan sesuai dengan jenis-jenisnya. Setelah itu, wadah-wadah akan dimasukkan ke dalam kontainer untuk dikirim ke benua Asia, Eropa Timur termasuk pula Afrika. Pakaian-pakaian yang dikirim mengikuti tingkat permintaan dan selera dari konsumen-konsumen di negara tujuan (Hansen, 2004). Ketika pakaian sampai, para importir akan mengambil dan menjualnya ke pihak ketiga (*broker*) yang akan menyuplai dan menjualnya lagi ke pedagang atau usaha-usaha kecil. Di Afrika, umumnya pasokan pakaian bekas ini akan dikumpulkan kembali untuk dibawa dan dijual ke negara-negara tetangga (Baden & Barber, 2005).

Distribusi pakaian bekas pun tidaklah merata di seluruh negara target ekspor, biasanya hanya ditentukan dari kualitas pakaian bekas tersebut. Pakaian bekas dengan kualitas yang paling tinggi akan diekspor ke Jepang. Pakaian yang berkualitas sedang, diekspor ke wilayah Amerika Selatan. Untuk pakaian musim dingin, diekspor ke negara-negara Eropa Timur. Sayangnya, pakaian bekas yang diekspor ke Afrika, merupakan pakaian bekas dengan kondisi rendah atau kurang layak, dan tidak laku lagi di pasaran AS (Brooks, 2015). Akan tetapi, dalam pandangan masyarakat Afrika, pakaian yang datang dari Barat termasuk AS, merupakan pakaian yang kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan produk lokal (Brooks, 2015).

Sejak negara-negara di Afrika mulai menerapkan liberalisasi ekonomi, keputusan ini ternyata menjadi bumerang bagi perkembangan industri-industri tekstil lokal. Permintaan akan produk-produk garmen ciptaan lokal termasuk rendah, penyebab utamanya adalah pendapatan masyarakat yang minim, karena sebagian besar penduduk di benua Afrika adalah masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan. Termasuk pula Afrika Timur. Kejayaan industri tekstil Afrika Timur terjadi di tahun 1960an hingga 1980an, ketika sektor industri tekstil serta sepatu diproduksi dan diperjualbelikan untuk pasar lokal serta diekspor hingga ke luar negeri (Frederick, 2018). Sebelum terjadinya liberalisasi ekonomi serta munculnya AGOA, produksi mulai dari bahan mentah hingga barang jadi oleh industri berkembang pesat. Akan tetapi, setelah itu banyak industri yang terpaksa untuk “gulung tikar” atau bangkrut (Frederick, 2018). Pakaian bekas yang pada awalnya merupakan hasil sumbangan atau donasi masyarakat dunia kepada orang-orang miskin, dijadikan sebagai peluang bisnis karena permintaan yang banyak.

Dalam menjalankan hubungan kerja sama perdagangan pakaian bekas dengan Afrika Timur, motif dan kepentingan Amerika Serikat (AS) beragam. AS tidak bertumpu pada peningkatan pendapatan atau penambahan devisa negara melalui perdagangan pakaian bekas ini. Sebab, perdagangan pakaian bekas merupakan jenis perdagangan yang dapat dikatakan sebagai perdagangan ‘memalukan’, baik dari segi negara yang mengimpor serta negara yang mengekspor. Bagi negara eksportir, citra negara tersebut dimata internasional dapat memburuk; karena mayoritas negara-negara di dunia memiliki peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas (Steffen, 2017).

Pakaian bekas sejatinya merupakan komoditas yang seharusnya bersifat ilegal; terutama apabila ditinjau dari pengaruh buruk yang ditimbulkan pada bidang ekonomi, sosial, serta lingkungan. Sedangkan untuk negara importir, kehadiran pakaian bekas menandakan ketidakmampuan suatu negara untuk menyokong perindustrian tekstil, garmen, serta *retail* di negaranya. Bagi Mugabo, salah satu *fashion icon* dari industri tekstil Rwanda, menyatakan bahwa keputusan pemerintah negaranya (re: menghentikan perdagangan pakaian bekas) adalah persoalan mengenai ‘harga diri’. Menurutnya, merupakan suatu kebanggaan apabila

¹ Metode pengiriman barang, pada umumnya adalah pakaian dan furnitur untuk dijual atau didonasikan kepada pihak lain.

masyarakat Rwanda mengenakan pakaian-pakaian buatan lokal (The Guardian, 2017). Oleh sebab itu, kasus perdagangan pakaian bekas ini tidak cocok apabila hanya dibahas dari segi ekonomi; dan motif utamanya pun bukan hanya sekadar mencari keuntungan materi, tetapi terdapat motif atau alasan lainnya yang mendasari kebijakan luar negeri AS ini.

Melalui pendekatan *rational actor*, AS dalam bekerjasama dengan negara-negara Afrika Timur yang tergabung di dalam East African Community (EAC), bersikap rasional demi memaksimalkan pencapaian kepentingannya di dalam kerjasama ini. Disini, pemicu rasionalitas AS dalam bertindak sebagai aktor adalah kepentingan untuk menyelesaikan isu lingkungan dan isu politik. AS berharap bahwa kedua isu ini dapat terselesaikan dalam kerjasama perdagangan pakaian bekas dengan EAC. Rasionalitas mengarahkan para pembuat kebijakan untuk mengeluarkan kebijakan yang dapat memaksimalkan utilitas yang diharapkan (Nau, 1998). Sanksi yang hendak dikeluarkan oleh AS bagi negara-negara EAC yang hendak menghentikan atau mengurangi impor pakaian bekas, merupakan bentuk 'protes' terhadap realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan perencanaan AS. Apabila impor pakaian bekas dihentikan, maka akan mengganggu penyelesaian permasalahan lingkungan dan politik AS. AS menghadapi dilema mengenai jumlah pakaian bekas yang terus bertambah dan produksinya tidak dapat dibendung dan mulai mudarnya pengaruh politik AS di wilayah Afrika, khususnya Afrika Timur.

Lingkungan atau kondisi perpolitikan dapat berdampak pada kegiatan bisnis atau perdagangan di suatu negara dalam berbagai bentuk. Permasalahan politik dapat meningkatkan resiko dalam perdagangan, dan aktor atau pelaku (negara) dapat kehilangan *profit*. Jika suatu negara berhasil mencapai kepentingan politiknya terhadap suatu negara lain, maka hasil (*outcomes*) akan sesuai dengan prediksi atau keinginan negara yang kuat, terutama dalam perihal perdagangan. Munculnya permasalahan terkait dengan perdagangan pakaian bekas akan berdampak pada meningkatnya tensi atau ketegangan hubungan politik antar negara. Hal ini terlihat ketika AS mengancam akan mengeluarkan Rwanda dari keanggotaan AGOA, dan negara-negara Afrika Timur lainnya yang berusaha untuk menerapkan pelarangan atau pembatasan impor pakaian bekas. Pakaian bekas, walaupun terkesan seperti permasalahan yang tidak penting, ternyata mampu mempengaruhi hubungan politik yang telah dibangun oleh AS dan negara-negara EAC. Apabila bisnis pakaian bekas ini terganggu, bagaimana AS hendak meningkatkan pengaruh politiknya di negara-negara Afrika Timur? Masuknya berbagai kekuatan dari dunia luar akan mempengaruhi stabilitas perpolitikan di wilayah Afrika, terutama di Afrika Timur. Absennya kestabilan politik di suatu wilayah atau negara dapat mengarah kepada pembentukan lingkungan *decision-making* (pembuatan keputusan) yang tidak diinginkan. Sehingga, keputusan-keputusan yang hadir bersifat jangka pendek (*short-term*) (Shahabad, 2014). Dahulu, AS berhasil mengontrol wilayah Afrika Timur. Namun sekarang, banyaknya intervensi yang datang dari luar sehingga AS harus menyelamatkan posisi strategisnya di wilayah ini.

Pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, AS menghadapi permasalahan yang cukup berbahaya mengenai strategi regionalnya terhadap Afrika. Padahal, maksud dari kebijakan Trump adalah untuk mengedepankan keamanan nasional, melindungi negara, mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, serta menjaga perdamaian dengan kekuatan. Akan tetapi, tujuan yang hendak dicapai berbanding terbalik dengan usaha yang dilakukan oleh Trump. Sebab, dominasi AS di Afrika mulai mendapatkan tantangan dari China, Rusia, India, bahkan sahabatnya sendiri yaitu Prancis dan Inggris yang juga mengikuti kontestasi perebutan pengaruh di benua tersebut. China melaksanakan kerja sama ekspor secara masif dengan Afrika

hingga mencapai angka \$103,19 triliun di tahun 2015 (Brookings, 2017). Fakta berupa data ini berbanding terbalik dengan jumlah ekspor AS ke Afrika, walaupun nilainya masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan China setelah mengalami defisit hingga 66 persen (Financial Times, 2018). Keinginan AS untuk memperluas perdagangannya dengan Afrika juga disebabkan oleh perkembangan Afrika untuk menjadi wilayah *fastest growing middle-class*, dengan proyeksi pertumbuhan penduduknya akan mencapai setengah dari jumlah populasi dunia di tahun 2050 nanti (Bloomberg, 2018).

Bukti bahwa AS memiliki kepentingan politik di Afrika Timur jelas terlihat dalam penerapan *Structural Adjustment Program* (SAP) yang masih berjalan hingga saat ini. Di dalam AGOA ini pun, terjadi pula pengurangan otonomi atau kewenangan suatu negara ketika bekerja sama dengan negara lain. Negara-negara Afrika harus mengadopsi kebijakan berbasis pasar yang disebut *Structural Adjustment Program* (SAP) di tahun 1980, sebagai syarat keanggotaan AGOA. Negara-negara Afrika harus memotong pengeluaran pemerintah, mengurangi pajak korporat (perusahaan), melaksanakan privatisasi, menghilangkan batasan-batasan dalam perdagangan, dan hilangnya proteksi terhadap industri nasional (Heidhues, 2011). Bahkan, apabila negara-negara Afrika yang berpartisipasi dalam AGOA ini gagal untuk mereformasi sistem pasarnya sesuai standar, akan dihapuskan *Generalized System Preferences* (GSP), yakni hilangnya kewenangan untuk memberlakukan *preferential tariffs* (permemberlakuan tarif impor atau ekspor terhadap barang-barang tertentu) (United Nations Conference on Trade and Development, 2010).

AS khawatir bahwa jika nantinya China atau Rusia akan datang ke Afrika, akan membawa instabilitas politik di wilayah tersebut. Sebab, AS sebagai pemain lama merasa bahwa posisinya akan terancam dengan kehadiran satu atau kedua negara tersebut. Bahkan, China dan Rusia berusaha untuk menjalankan kepentingan politiknya dengan menempuh jalur perdagangan. AS wajar untuk takut, sebab wilayah Afrika merupakan wilayah yang sarat akan konflik. Sehingga, intervensi-intervensi dari luar dapat dengan mudah masuk dan ikut dalam kontestasi perebutan pengaruh politik dengannya. Tipe pemerintahan di negara-negara Afrika masih didominasi oleh tipe rezim *mixed type*, yakni negara-negara Afrika tidak dapat disebut sebagai negara demokrasi namun juga bukan negara dengan tipe pemerintahan otoriter. Dengan kata lain, negara-negara ini memasuki fase peralihan yang rentan dengan perpecahan. Apabila gejala perpolitikan terjadi, maka aktivitas ekonomi pun akan terhambat, termasuk perdagangan pakaian bekas. Seperti yang telah disebutkan pada BAB I dan BAB II bahwa keuntungan dari perdagangan pakaian bekas sebesar \$151 juta. Inilah alasan mengapa AS mengamankan perdagangan pakaian bekasnya demi mengembalikan kekuasaan dan pengaruh politiknya dimulai regional Afrika Timur. Situasi politik di suatu negara dapat mempengaruhi bidang ekonomi, yang berimbas pula pada bisnis. AS khawatir apabila negara-negara Afrika beralih darinya, maka segala kemudahan dan keuntungan perdagangan dengan Afrika yang didapatkan selama ini akan hilang direbut oleh negara lain.

Kedua, kondisi lingkungan AS sebagai salah satu motif utama. Kondisi lingkungan di AS akibat banyaknya jumlah *textile waste* (sampah pakaian bekas) cukup memprihatinkan, terutama permasalahan mengenai polusi air. Setiap tahunnya, perairan di AS terkontaminasi oleh 1,2 triliun galon polutan dan limbah yang mayoritas berasal dari aktivitas industri pakaian (Chambers, 2011). Sayangnya, perairan bersih di sekitar pemukiman warga juga ikut tercemar akibat kegiatan ilegal yakni pembuangan limbah dan polutan yang dilakukan secara sembarangan. Permasalahan besar lainnya di AS adalah sampah, termasuk sampah tekstil yang menumpuk di wilayah daratan. Sampah-sampah ini memiliki kandungan atau substansi yang

dapat mencemari dan merusak kualitas air di dalam tanah, terutama sampah yang bersumber dari garmen atau tekstil. AS terkenal dengan besarnya jumlah sampah daratan (*landfill*) yang dipadati oleh *solid waste*. Jenis sampah atau limbah ini tidak dapat terurai melalui proses alamiah sehingga akan tetap dan terus menumpuk apabila tidak segera ditangani. Akibat kekurangan lahan pembuangan, sampah-sampah ini menjadikan sebagian lokasi “terpaksa” digunakan sebagai tempat penampungan sampah sementara, termasuk sampah pakaian-pakaian yang tidak terpakai.

Negara kehilangan banyak wilayah yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat yang produktif. Menurut laporan dari Solid Waste Environmental Excellence Protocol (SWEET), terdapat sekitar 2000 lahan pembuangan yang aktif. Beberapa dari lahan tersebut, bahkan sudah mencapai kapasitas maksimum untuk menampung lebih banyak sampah (Global Citizen, 2018). Organisasi ini memprediksikan bahwa dalam 18 tahun mendatang, AS akan kehilangan banyak lahan produktif dan tidak dapat dimanfaatkan sama sekali akibat penumpukan sampah (Thompson, 2018). Wilayah New York sudah mulai memindahkan berbagai sampah yang ke negara-negara bagian lain akibat *over capacity*, yang kerap menjadi langganan pengiriman sampah dari New York salah satunya adalah Alabama. (The Outline, 2018). Bahkan, AS dinobatkan sebagai negara penyumbang sampah terbesar di dunia, dengan tiap penduduknya setidaknya membuang sampah sekitar 1.609 pon per tahunnya.

Cara yang selama ini ditempuh oleh negara adalah membakar sampah-sampah tersebut. Beberapa wilayah, bahkan mendapatkan izin dari pemerintah untuk dijadikan lahan khusus pembakaran sampah. Sayangnya, solusi yang dikeluarkan tentu menambah permasalahan baru. Pembakaran sampah akan menimbulkan polusi udara, terlebih wilayah pembakaran tersebut terletak dekat dengan pemukiman masyarakat (Global Citizen, 2018). Menurut Environmental Protection Agency (EPA), AS membakar 33 juta ton sampah setiap tahunnya (Environmental Protection Agency, 2017). Permasalahan ini sangatlah kompleks untuk dapat di atasi oleh pemerintah AS sendiri tanpa meminta, mencari bantuan atau bekerja sama dengan negara-negara lain. Afrika Timur dianggap memenuhi kriteria untuk pelaksanaan kerja sama pakaian bekas ini. Salah satunya, dipengaruhi oleh fakta bahwa negara-negara tersebut belum memiliki kepastian hukum mengenai pelarangan impor pakaian bekas.

Permasalahan mengenai aksi daur ulang pakaian pun mengalami kebuntuan. Sebab, adanya ketidakseimbangan jumlah pakaian yang telah direduksi dan didaur ulang menjadi komponen baru, dengan jumlah pakaian yang diproduksi setiap tahunnya. Contohnya seperti perusahaan fashion raksasa Hennes and Mauritz (H&M), yang juga beroperasi di Amerika Serikat dan telah membangun sebanyak 578 retail. Perusahaan ini memiliki inisiatif untuk melaksanakan kegiatan daur ulang pakaian. Para konsumen dapat menukarkan pakaian-pakaian lamanya dengan kupon diskon untuk pembelian selanjutnya (HuffPost, 2017). Keputusan ini dianggap dapat mengurangi jumlah Municipal Solid Waste (MSW) di daratan. Oleh karena itu, satu-satunya cara yang rasional demi mengentaskan permasalahan pakaian bekas adalah dalam bentuk perdagangan pakaian bekas. Adanya *demand* yang besar dari negara-negara Afrika Timur menghasilkan dua keuntungan sekaligus dari perdagangan pakaian bekas: menyelesaikan permasalahan lingkungan domestik sekaligus mendapatkan *profit* dari hasil perdagangan tersebut.

Akan tetapi, apakah negara-negara di Afrika Timur yang tergabung di dalam EAC dan masih tergolong ke dalam kategori *Lesser Developed Countries* (LDC) ini diuntungkan dengan adanya penjualan pakaian bekas? Terlepas dari keinginan negara-negara tersebut berdirika

dalam perindustrian tekstil atau garmen, keadaan di lapangan justru membuktikan sebaliknya. Masih banyak masyarakatnya yang bergantung pada ketersediaan pakaian bekas. Adanya permintaan yang membumbung tinggi dari masyarakat miskin, menjadi alasan utama yang mempersulit putusnya rantai ketergantungan ini. Di satu sisi, perdagangan pakaian bekas mengakibatkan banyaknya industri lokal yang beroperasi di bidang tekstil menjadi bangkrut. Namun, disisi lain, distribusi pakaian bekas ini membuka lapangan kerja baru (contohnya importir dan distributor) yang mampu memperkerjakan banyak orang. Terlebih lagi, pekerjaan ini tidak membutuhkan *skill* atau kemampuan khusus seperti menjahit atau mendesain pakaian, sehingga para masyarakatnya yang mayoritas berpendidikan rendah dapat menggantungkan hidupnya lewat mata pencaharian tersebut. Menurut data dari USAID, perdagangan pakaian bekas mampu menciptakan sekitar 355.000 mata pencaharian bagi negara-negara EAC (USAID, 2017).

KESIMPULAN

Menurut pembahasan yang telah diuraikan secara mendetail di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan: keputusan AS untuk tetap mempertahankan kerja samanya dengan EAC dalam forum AGOA; didasari karena AS membutuhkan negara-negara EAC untuk mencapai kepentingannya. Inilah yang terjadi antara hubungan kerja sama pakaian bekas AS dengan EAC. AS ternyata bertindak secara rasional. Rasionalitas ini dibuktikan dengan motif AS dalam menjalankan kerjasama perdagangan pakaian bekas dengan EAC. Yang pertama, yaitu AS memiliki kepentingan politik di dalamnya, yakni untuk mengembalikan pengaruhnya dan kekuatan geopolitiknya dimulai dari wilayah Afrika Timur. Akan tetapi, munculnya pihak-pihak lain yang tidak diinginkan (terutama China, dimana AS sedang melaksanakan perang dagang dengan negara tersebut) yang dianggap akan mengganggu kepentingan AS. Sehingga, negara ini berusaha mengamankan perdagangan pakaian bekasnya dengan negara-negara EAC disebabkan oleh jenis perdagangan inilah yang mendominasi kerjasama dagang antara kedua belah pihak. AS pun khawatir karena China mulai melakukan kerjasama perdagangan pakaian bekas yang masif dengan negara-negara EAC.

Motif yang kedua, yaitu didasari oleh permasalahan lingkungan AS yang disebabkan oleh textile waste. *Textile waste* ini merupakan limbah yang berasal dari pakaian bekas. Textile waste ini menjadi sampah yang memadati lahan-lahan produktif (*landfill*) dan mencemari lingkungan. Aktivitas industri *fast-fashion* yang tidak dapat dibendung serta pola masyarakat yang cenderung konsumtif terhadap pakaian ikut berkontribusi ‘menyumbang’ pakaian bekas dalam jumlah besar dan sulit untuk dikontrol. Sehingga, satu-satunya keputusan yang rasional bagi AS untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan cara menjualnya ke negara-negara Afrika Timur. Negara-negara ini membutuhkan pakaian karena industri pakaian domestik telah redup. AS mendapatkan dua keuntungan sekaligus dari hasil perdagangan ini: *profit* berupa keuntungan penjualan dan permasalahan lingkungan dapat teratasi.

REFERENSI

- Adar, K. G., 2011. *East African Community*, s.l.: International Democracy Watch.
- African Growth and Opportunity Act, 2013. *AGOA.info website*. [Online] Available at: <http://agoa.info/> [Diakses 10 Oktober 2018].
- African Growth and Opportunity Act, 2015. *AGOA, decoding for a successful 2025 closure*. [Online] Available at: <https://agoa.info/news/article/5865-agoa-decoding-for-a-successful-2025-closure.html> [Diakses 10 Oktober 2018].

- African Growth and Opportunity Act, 2018. *'US threats force EAC to back down on secondhand clothes ban'* - Article. [Online] Available at: <https://agoa.info/news/article/15380-us-threats-force-eac-to-back-down-on-secondhand-clothes-ban.html> [Diakses 6 Oktober 2018].
- Baden, S. & Barber, C., 2005. *The impact of the second-hand clothing trade on developing countries*, Oxford: Oxfam Library.
- Brookings, 2017. *A sound Trump policy on Africa could protect US interest*. [Online] Available at: <https://www.brookings.edu/opinions/a-sound-trump-policy-on-africa-could-protect-us-interests/> [Diakses 18 Februari 2019].
- Brooks, A., 2015. *Clothing Poverty : The Hidden World of Fast Fashion and Second-hand Clothes*. London : Zed Books.
- Brooks, A., 2015. *Clothing Poverty: The Hidden World Of Fast Fashion And Secondhand Clothes*. London: Zed Books.
- CBS News, 2018. *Barack Obama in Kenya for 1st time post-presidency*. [Online] Available at: <https://www.cbsnews.com/news/barack-obama-in-kenya-for-1st-time-post-presidency/> [Diakses 2 February 2019].
- Chambers, N. B., 2011. How Infrastructure Makes Water Work for Us. Dalam: *Urban Green : Architecture for the Future*. New York: Palgrave MacMillan, p. 244.
- East African Community, 2018. *History of the EAC*. [Online] Available at: <https://www.eac.int/eac-history> [Diakses 2 February 2019].
- Environmental Protection Agency, 2017. *Advancing Sustainable Materials Management: Facts and Figures*. [Online] Available at: <https://www.epa.gov/facts-and-figures-about-materials-waste-and-recycling/advancing-sustainable-materials-management-0> [Diakses 14 March 2019].
- Financial Times, 2018. *The Scramble for business in Africa*. [Online] Available at: <https://www.ft.com/content/62b1e38c-bd83-11e8-94b2-17176fb93f5> [Diakses 18 Februari 2019].
- Frederick, K., 2018. *Deindustrialization in East Africa: Textile Production in an Era of Globalization and Colonization, c. 1830-1940*. Wageningen: Wageningen University.
- Global Citizen, 2018. *The US Is Rapidly Running Out of Landfill Space*. [Online] Available at: <https://www.globalcitizen.org/en/content/us-landfills-are-filling-up/> [Diakses 14 March 2019].
- Global Citizen, 2018. *The US Is Rapidly Running Out of Landfill Space*. [Online] Available at: <https://www.globalcitizen.org/en/content/us-landfills-are-filling-up/> [Diakses 14 March 2019].
- Hansen, K., 2004. Helping or hindering? Controversies around the international second-hand. *Anthropology Today*, 20(4), pp. 3-9.
- Heidhues, F., 2011. Lessons from Structural Adjustment Programmes and Their Effects in Africa. *Quarterly Journal of International Agriculture*, 50(1), pp. 55-64.
- HuffPost, 2017. *How You Can Give Your Old Clothes To H&M For Recycling*. [Online] Available at: https://www.huffingtonpost.com.au/2017/01/29/how-you-can-give-your-old-clothes-to-handm-for-recycling_a_21702753/ [Diakses 8 March 2019].
- Katende-Magezi, E., 2017. The Impact of Second Hand Clothes and Shoes in East Africa. *Cuts International*, pp. 13-14.
- Maasdorp, G. G., 1999. *The Establishment of an East African Trade Regime*, Tanzania: Secretariat of the Commission for the East African Corporation.

- Mumbere, D., 2018. *Rwanda insists on second-hand clothing ban, says U.S. can withdraw AGOA benefits*. [Online] Available at: <http://www.africanews.com/2018/04/04/rwanda-insists-on-second-hand-clothing-ban-says-it-s-up-to-us-to-withdraw-agoa/> [Diakses 5 Oktober 2018].
- Nau, R., 1998. *Arbitrage, Incomplete Models and Interactive Rationality*. [Online] Available at: <http://www.ibrarian.net/navon/page.jsp?paperid=17788754&searchTerm=prospect+the+ory+an+analysis+of+decision+under+risk> [Diakses 7 Juni 2019].
- Nixon, F. I., 1973. *Economic Integration and Industrial location: An East African Case Study*. New York: Longman.
- Norris, L., 2012. Trade and Transformations of Secondhand Clothing. *Textile*, 10(2), pp. 128-143.
- Office of United States Trade Representative, 2018. *FACT SHEET : The United States - East African Community Cooperation Agreement*. [Online] Available at: <https://ustr.gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2015/february/fact-sheet-united-states---east> [Diakses 2 February 2019].
- Quartz Africa, 2018. *Trump's "trade war" includes punishing Africans for refusing second-hand American clothes*. [Online] Available at: <https://qz.com/africa/1245015/trump-trade-war-us-suspends-rwanda-agoa-eligibility-over-secondhand-clothes-ban/> [Diakses 5 Oktober 2018].
- Shahabad, R. D., 2014. The Impacts of Political Stability on Economic Growth: Evidence from Panel data Analysis. *Institute of Graduate Studies and Research*, p. 56.
- Steffen, A., 2017. *Second-hand consumption as a lifestyle choice*. s.l.:International University Heidelberg.
- The Conversation, 2018. *America's petty policy on used clothes for Africa*. [Online] Available at: <https://theconversation.com/americas-petty-policy-on-used-clothes-for-africa-95132> [Diakses 6 Oktober 2018].
- The Conversation, 2018. *America's petty policy on used clothes for Africa*. [Online] Available at: <http://theconversation.com/americas-petty-policy-on-used-clothes-for-africa-95132> [Diakses 5 Oktober 2018].
- The East African, 2018. *US threatens force EAC to back dwn on second hand clothes*. [Online] Available at: <https://www.theeastafrican.co.ke/business/US-threats-force-EAC-to-back-down-on-mitumba-ban/2560-4317988-8h2pow/index.html> [Diakses 5 Oktober 2018].
- The Guardian, 2017. *'It's about our dignity': vintage clothing ban in Rwanda sparks US trade dispute*. [Online] Available at: <https://www.theguardian.com> [Diakses 5 Oktober 2018].
- The Guardian, 2017. *'It's about our dignity': vintage clothing ban in Rwanda sparks US trade dispute*. [Online] Available at: <https://www.theguardian.com/global-development/2017/dec/29/vintage-clothing-ban-rwanda-sparks-trade-dispute-with-us-united-states-secondhand-garments> [Diakses 8 March 2019].
- The Observatory of Economic Complexity, 2016. *Used Clothing*, Massachusetts: MIT Press.
- Tulya-Muhika, S., 1995. *Lessons from the Rise and Fall of the East African Community: Summary*. East African Cooperation Forum penyunt. Kampala: Friedrich Ebert Foundation.
- United Nations Conference on Trade and Development, 2010. Handbook on the Scheme of the United States of America. *Generalized System of Preferences*, p. 48.

USAID, 2017. *Overview of the Used Clothing Market in East Africa: Ananalysis of Determinants and Implications* , Washington D.C. : USAID .

Yiannoutsos, A., 2017. *The Controversy of Used Clothing: East African-US Trade Relations*. [Online] Available at: <https://www.mironline.ca/controversy-of-used-clothing/> [Diakses 5 Oktober 2018].